

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 60 orang tenaga kerja anak putus sekolah yang bekerja pada sektor informal di Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Menurut jenis kelamin tenaga kerja anak putus sekolah yang bekerja di sektor informal terdiri dari laki-laki sebanyak 43 orang (71,67 %) dan perempuan sebanyak 17 orang (28,33 %). sebanyak 55 % dari tenaga kerja anak yang putus sekolah yang bekerja di sektor informal di Kota Pekanbaru tamat SD, 35 % tamat SD dan hanya sebesar 10 % yang tamat SMP. Sebanyak 90 % dari tenaga kerja anak yang putus sekolah tidak menyelesaikan tingkat pendidikan dasar, sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas tenaga kerja.

Faktor ekonomi (biaya tidak mampu) merupakan penyebab utama dari anak putus sekolah, yakni sebesar 55 % dari jumlah tenaga kerja anak putus sekolah yang diteliti.

- b. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja anak pada sektor informal di Kota Pekanbaru adalah : loper koran, kernet oplet, pedagang kaki lima, penyemir sepatu, pelayan toko, pembantu rumah tangga, pengemis, pedagang asongan, pengamen dan pemulung.

- c. Nilai ekonomi anak putus sekolah yang dilihat dari lama bekerja pada sektor informal dalam seminggu menunjukkan bahwa sebanyak 60 % dari tenaga kerja anak tergolong ke dalam pekerja dengan jam kerja panjang, dengan lama kerja 45 jam lebih dalam seminggu, 21,67 % dari tenaga kerja tergolong ke dalam pekerja dengan jam kerja normal, sedangkan tenaga kerja anak yang tergolong ke dalam pekerja dengan jam kerja pendek hanya sebesar 18,33 %. Rata-rata penghasilan tenaga kerja anak dalam seminggu yang dominan berkisar antara Rp 100.000 – Rp 150.000 sebesar 41,67 % dari tenaga kerja anak. Sebanyak 26,67 % berpenghasilan kurang dari Rp 100.000 dalam seminggu, dan hanya sebesar 23,33 % tenaga kerja anak yang berpenghasilan Rp 200.000 ke atas.
- d. Dampak positif dari tenaga kerja anak yang bekerja di sektor informal terhadap ekonomi keluarga ditunjukkan oleh kontribusi (sumbangan) dari penghasilan tenaga kerja anak terhadap penghasilan total keluarga dengan kisaran antara 18,06 % sampai dengan 49,15 % dari total penghasilan keluarga. Kontribusi tenaga kerja anak yang terbesar pada jenis pekerjaan pembantu rumah tangga, sedangkan kontribusi terkecil pada jenis pekerjaan pengamen.

Dampak negatif dari tenaga kerja anak yang bekerja pada sektor informal adalah rendahnya tingkat pendidikan anak, sehingga menyebabkan terbatasnya tenaga kerja anak untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang lebih baik. Akibatnya, penghasilan per jam kerja dari tenaga

kerja relatif rendah. dimana sebanyak 70 % dari tenaga kerja anak memperoleh penghasilan di bawah Rp 3.000 per jam kerja.

- e. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi masalah kemiskinan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2008, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Kota Pekanbaru.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai bagian dari strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru, antara lain :

- Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru.
- Memfungsikan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru.
- Membentuk Komite Pengawasan Rumah Tangga Miskin (RTM) ditingkat Kota dan Kecamatan.
- Membuat Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru.
- Menugaskan Satuan Kerja Pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru, terdiri dari : BPMKB, Dinas Sosial dan Pemakaman, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kimpraswil dan KPIPT.

- Menugaskan Satuan Kerja Pendukung Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru, yang terdiri dari : Bappeda, Dinas Pasar, Dinas Pendaftaran Penduduk, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Satpol PP.
- Menggerakkan Partisipasi Swasta dan Masyarakat disetiap Kecamatan melalui Gerakan Cinta Keluarga Miskin (GENTAKIN).
- Melakukan Koordinasi dengan Dunia Usaha dalam rangka membantu Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru.

5.2. Saran

- Pemerintah dapat memberikan bantuan modal yang lebih fleksibel
- Setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan karakteristik usaha informal di wilayahnya serta aspek-aspek yang terkait seperti ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.